

ANALISIS MASA PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA 1908-1942

Bela Wahyuni ¹ Irhas Fansuri Mursal ²

¹Mahasiswa Prodi Ilmu Sejarah Universitas Jambi, ²Dosen Prodi Ilmu Sejarah

¹bellawhyn11@gmail.com, ²irhas.fansuri@unja.ac.id

Naskah diterima: 20/12/2021, Naskah direvisi: 8/3/2022, Naskah disetujui: 10/6/2022

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the period of the Indonesian national movement. The formation of the Budi Utomo organization in 1908 and the birth of many educated elite groups created the forerunner of a new chapter in the history of the struggle of the Indonesian people in the face of the Dutch colonial rule. The results of this study indicate that after the establishment of Budi Utomo many political organizations and parties were born in Indonesia, these organizations have the same goal, namely an independent Indonesia. One of the main media in this Indonesian national movement is the press, in fact every movement organization in the early 20th century had its own newspaper. In their struggle these organizations have had different struggles and faced various kinds of obstacles which are known as movement crises. The long history of the Indonesian national movement will be discussed in this paper, especially the developments that will be discussed are from 1908 when the first organization was started to 1942 when the Dutch colonial government declined in Indonesia. The method used in this study is a historical research method, namely: Heuristics, Source Criticism, Interpretation and also Historiography.

Keywords: *Movement, National, Indonesia.*

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis masa pergerakan nasional Indonesia. Terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 1908 dan lahirnya banyak golongan elit terpelajar menjadikan cikal bakal lahirnya babak baru dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam menghadapi pemerintahan kolonial Belanda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah berdirinya Budi Utomo banyak organisasi maupun partai politik yang lahir di Indonesia, organisasi-organisasi ini mempunyai tujuan yang sama yaitu Indonesia merdeka. Salah satu media utama dalam pergerakan nasional Indonesia ini adalah pers, bahkan setiap organisasi pergerakan pada awal abad ke-20 memiliki surat kabar masing-masing. Dalam perjuangannya organisasi-organisasi ini memiliki corak perjuangan yang berbeda-beda serta menghadapi berbagai macam rintangan yang disebut sebagai krisis pergerakan. Sejarah yang panjang mengenai pergerakan nasional Indonesia akan dibahas dalam tulisan ini, terutama perkembangan yang akan dibahas adalah dari tahun 1908 saat dimulainya organisasi pertama hingga 1942 pada saat kemunduran pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Metode yang digunakan didalam

penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yaitu: Heuristik, Kritik sumber, Interpretasi dan juga Historiografi.

Kata Kunci: *Pergerakan, Nasional, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat khususnya masyarakat yang terjajah akan selalu muncul suatu usaha untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah sehingga memiliki kehidupan yang merdeka. Di Indonesia bentuk atau usaha untuk melepaskan diri dari penjajah ini terdapat dua fase yang pertama adalah masa sebelum abad ke-20 atau yang biasa disebut dengan perlawanan secara non-kooperatif, pada masa ini perlawanan rakyat Indonesia dalam upaya membebaskan diri dari belenggu penjajah masih bersifat kedaerahan dan alat untuk melawannya merupakan senjata seperti bambu runcing, sedangkan fase yang kedua yaitu dimulai pada tahun 1908 atau tepatnya setelah organisasi pertama resmi didirikan yaitu organisasi Budi Utomo.

Dalam mengartikan pergerakan nasional, secara umum dapat diartikan melalui pendekatan "multidimensional", yang berarti meliputi segala bidang, seperti bidang sosial, budaya, ekonomi dan juga politik.¹ Namun diantara bidang-bidang yang telah disebutkan tersebut yang paling menonjol atau berpengaruh adalah pergerakan nasional yang ditinjau dalam bidang politik. Karena pola penjajahan sudah dipastikan menggunakan aspek politik dalam segala bidang. Konsep tinjauan multidimensional ini dapat digunakan untuk melihat corak perjuangan setiap organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia yang terbagi menjadi 3 periode yaitu masa pembentukan, masa radikal dan juga masa moderat. Namun tidak semua organisasi ini menjalani organisasinya secara multidimensional, contohnya saja seperti Indische Partij.

Selain organisasi-organisasi besar yang bersifat nasional, perjuangan rakyat Indonesia dalam masa pergerakan nasional ini dihiasi juga oleh organisasi pergerakan yang bersifat daerah namun memiliki tujuan nasional, seperti Jong Java, Jong Minahasa, Jong Bataks Bond, Pasundan, Jong Ambon, Jong Clebes, Jong Sumatranen Bond, Timorsch Verbond dan kaum betawi dan yang lainnya. Selain organisasi daerah yang sudah disebutkan diatas, tentu saja masih ada organisasi-organisasi daerah pada masa pergerakan nasional yang lain. Namun penggambaran dari organisasi diatas merupakan organisasi-organisasi yang menjadi cikal bakal lahirnya sumpah pemuda nantinya. Seiring berjalannya waktu dan semakin menjamurnya organisasi-organisasi pergerakan di berbagai daerah pihak kolonial Belanda pun mengambil sebuah kebijakan demi menjaga status quo nya.

Ketika mulai banyak terjadi pergerakan radikal serta pemberontakan, salah satu jalan yang diambil oleh Pemerintah Kolonial untuk tetap mempertahankan status quo nya yaitu dengan membentuk sebuah Dinas Intelijen Politik.² Pembentukan Dinas Intelijen Politik dikarenakan organisasi yang terus tumbuh dan berkembang serta ada beberapa organisasi yang bersifat radikal ini sangat

¹ Ors. Sudiyo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia: Dari Budi Utomo sampai dengan Pengakuan Kedaulatan*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), hlm 48.

² Atik Fajar Kurniawati, dkk, *Politieke Inlichtingen Dienst (PID) Pada Masa Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1916-1942*, Jurnal CANDI, Vol 12, No 2 (2015), hlm 59.

mempengaruhi ruang gerak setiap organisasi karena DIP sangat mengawasi segala gerak gerik yang dianggap mencurigakan dan dapat menyebabkan terancamnya status quo pemerintah kolonial Belanda. Selain dibentuknya DIP tentu saja ada hal lain yang menyebabkan terjadinya krisis pergerakan yaitu pada masa krisis malaise pada tahun 1930 yang terjadi dan juga pemberontakan komunis kepada pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1926/1927.

Perjuangan dalam babak baru yang terjadi di Indonesia atau yang biasa disebut dengan zaman pergerakan nasional sangat berpengaruh pada proses perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Organisasi yang sangat berpengaruh tersebut seperti Budi Utomo, PNI, PKI, Parindra, GAPI serta organisasi seperti Jamiatul Khair, Al-Isyad, Taman Siswa, Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan lainnya.³ Masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pada akhirnya berakhir pada tahun 1942 yaitu pada saat pemerintahan Jepang mengambil alih Indonesia atau Hindia Belanda ini dari Belanda dengan melakukan ekspansi militer sehingga kolonial Belanda pun tidak sanggup menghadapinya dan akhirnya menyerah. Maka pada tahun 1942 inipun berakhir masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia dan digantikan oleh masa pemerintahan kolonial Jepang. Pada penulisan artikel ini akan mengkaji tentang masa pergerakan nasional dimulai pada tahun 1908-1942 yang mana tahun 1942 merupakan masa berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda.

METODE PENELITIAN

Para peneliti melakukan penelitian sejarah tentu saja bertujuan untuk dapat mengetahui kisah dari masa lalu, belajar dari masa lalu melalui sebuah pengalaman baik dari kegagalan maupun belajar dari keberhasilan itu sendiri. Selain itu penelitian sejarah juga sangat bermanfaat bagi manusia dalam mempelajari masa lalu untuk melihat apakah kejadian itu bisa diaplikasikan pada masa sekarang, serta juga membantu memprediksi apa yang akan terjadi dimasa mendatang melalui kajian dari sejarah yang akan dibahas. Di dalam penulisan ini tentu saja penulis menggunakan empat metode penelitian sejarah diantaranya adalah Heuristik, Kritik sumber, Interpretasi dan juga Historiografi. Didalam kajian ini sumber yang digunakan meliputi Buku, Jurnal, Artikel baik dari Internet maupun sumber cetak. Sumber-sumber yang digunakan dari peneliti terdahulu menjadi bahan acuan bagi penulis untuk membahas secara detail tentang menganalisis masa pergerakan nasional di Indonesia pada tahun 1908-1942 ini.

PEMBAHASAN

KONSEP PERGERAKAN NASIONAL

Sartono Kartodirjo dalam mendeskripsikan pergerakan nasional menggunakan istilah "Kebangunan Nasional", ia mengartikannya pada saat

³ Husda, Husnaini, *Rekonstruksi Sejarah Kebangkitan Nasional*, Jurnal Adabiya. Vol 21, No 2 (2019), hlm 32.

dimulainya fase baru dalam sejarah perjuangan bangsa yakni pada saat berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Batavia.⁴ atau yang sekarang bernama Jakarta. Menurutnya, kelahiran organisasi baru ini didasarkan atas pengalaman-pengalaman pada masa lampau yang mana sebelum tahun 1908 model perlawanan bersifat lokal sehingga tidak efektif. Karena itu, dalam fase ini timbulah kesadaran mendalam akan persatuan dan kesatuan dengan menghimpun secara terorganisir segenap potensi perjuangan yang ada dengan konsep baru. Perubahan pergerakan melawan penjajah dari non kooperatif menjadi kooperatif merupakan salah satu hasil dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda yaitu politik *ethis*.

Lahirnya kaum-kaum terpelajar diberbagai daerah terutama di Batavia menumbuhkan kesadaran secara nasional tentang impian mencapai kemerdekaan. Impian mencapai kemerdekaan seorang bangsa penjajah tentu saja sudah ada sejak awal kedatangan bangsa kolonial ke Nusantara, namun segala upaya yaitu pergerakan melawan penjajah yang di lakukan secara non kooperatif dan hanya bersifat kedaerahan saja, tidak membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini tentu saja karena dalam segi kekuatan jika hanya melakukan perlawanan secara kedaerahan maka hasilnya tetap kolonial Belanda yang memenangkan karena mereka mempunyai kekuatan militer dan persenjataan yang hebat. Maka pergerakan secara kedaerahan dan memakai senjata ini hanya akan memakan lebih banyak korban jiwa yaitu rakyat yang ikut bertarung.

Moedjanto mencirikan perbedaan perjuangan maupun perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Nusantara sebelum dan setelah tahun 1900, adalah sebagai berikut: (1) Sebelum tahun 1900: perjuangan rakyat berciri perlawanan atau perjuangan bersifat kedaerahan atau lokal, menggantungkan pada tokoh kharismatik, dan belum ada tujuan yang jelas; (2) Setelah 1900: perjuangan rakyat berciri perjuangan bersifat nasional, diplomasi, dan perjuangan dengan organisasi modern.⁵ Alasan mengapa fase baru ini disebut pergerakan nasional, yaitu karena orientasi perjuangan yang dilakukan melalui wadah organisasi modern menyangkut arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia.

IDENTIFIKASI ORGANISASI PERGERAKAN DI SETIAP PERIODE

Sebelum organisasi Budi Utomo lahir pada awal abad ke 20 telah bergemangnya kesadaran pada kaum wanita yang dipelopori oleh R.A.Kartini. Emansipasi sendiri merupakan keinginan yang terkandung dalam jiwa wanita pada waktu itu yaitu keinginan untuk mendapatkan persamaan hak dan kebebasan dari kurungan adat. RA Kartini (1879-1904), pelopor gerakan emansipasi, menyerukan agar bangsa Indonesia diberi pendidikan, khususnya

⁴ Sartono Kartodirjo, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia V*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Balai Pustaka, 1977), hlm 56.

⁵ G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20*. (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm 112.

kepada wanita Indonesia karena mereka yang memikul tugas suci.⁶ Kesuksesan gerakan emansipasi yang dipelopori oleh Kartini dikarenakan idealismenya yang tinggi terhadap bangsanya. Meski Kartini merupakan seorang bangsawan yang sangat terkekang oleh adat Jawa tetapi ia mempunyai pikiran terbuka dan memiliki beberapa teman orang Eropa.⁷ Ia menginginkan agar pendidikan diberikan pada seluruh orang bukan hanya kepada kaum pria ataupun para golongan atas saja dan akhirnya menjadi pegawai Belanda, menurutnya pendidikan harus diberi secara merata terutama pada perempuan.

Gerakan emansipasi wanita yang diiringi dengan diterapkannya politik etis ini melahirkan para golongan terpelajar, tak terkecuali perempuan yang mana pada awal abad ke-20 ini telah berkesempatan mendapatkan pendidikan formal. Sehingga lahirlah pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh perempuan dari berbagai daerah.

Pada masa pembentukan dihiasi oleh organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam dan Indische Partij. Tujuan awal pendirian organisasi-organisasi ini lebih kepada bidang sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan namun seiring berjalannya waktu organisasi inipun juga terjun ke dunia politik. Dalam kongres Budi Utomo dibahas tentang dua prinsip perjuangan organisasi ini, pertama golongan muda menginginkan perjuangan politik dalam usahanya menghadapi pemerintah kolonial, sedangkan golongan tua di Budi Utomo mempertahankan cara perjuangan lama yaitu perjuangan yang bersifat sosio-kultural. Selanjutnya yaitu Sarekat Islam didirikan karena persaingan antara pedagang Cina dan Jawa, serta karena perubahan tingkah laku & arogansi pedagang Cina sehingga organisasi ini di jadikan sebagai wadah dalam perjuangan di bidang ekonomi. Terakhir yaitu Indische Partij yang didirikan atas keinginan untuk hidup tanpa diskriminasi sosial dari kaum penjajah.

Pada rentang tahun 1920-1930 ini disebut sebagai masa radikal dikarenakan oleh pola pergerakan yang dilakukan organisasi bersifat radikal atau non kooperatif, yaitu tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa tersebut berdiri beberapa organisasi, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai yang mengembangkan paham Komunis, terutama di kalangan buruh. Sejak tahun 1924, PKI mengorganisasi berbagai aksi pemogokan, yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda mengawasi PKI dengan ketat dan ruang gerak aktifis partai dipersempit.⁸ Perhimpunan Indonesia atau PI menyuarakan aksinya melalui berbagai orasi sehingga melahirkan organisasi baru seperti lahirnya partai nasional Indonesia (PNI) tahun 1927, jong

⁶ Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1942-1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988), hlm 32.

⁷ Toer, Pramoedya Ananta, *Panggil Saja Aku Kartini*, (Jakarta: Lentera Dipantara, 2003), hlm 10.

⁸ Mardiyah. "Ulama dan Pergerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Banten Abad Ke-20", *Skripsi Fakultas Adam Dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017, hlm 46.

Indonesia (pemuda Indonesia) tahun 1927, dan perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI) tahun 1926.⁹ Partai Nasional Indonesia atau PNI merupakan partai radikal yang mempelopori terbentuknya organisasi sosial politik di Indonesia yakni Permusyawaratan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

Pada masa ini muncul berbagai organisasi politik yang bersifat moderat yaitu menerapkan prinsip kooperasi. Hal ini dikarenakan ketatnya pengawasan kolonial Belanda melalui badan pengawas yang dibentuknya yaitu PID (Politieke Intelligent Dienst). Organisasi yang berdiri yang bersifat kooperatif ini. Seperti, Partai Indonesia Raya (Parindra), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), dan Gerakan Politik Indonesia (GAPI). Salah satu program yang dilakukan Parindra adalah melakukan pencerdasan secara politik, ekonomi, sosial kepada masyarakat sebagai bekal dalam menjalankan pemerintahan sendiri di masa depan. Gagasan pendirian partai Gerindo bermula ketika Gubernur Jenderal De Jong memberantas seluruh partai politik yang bergerak secara non-kooperatif dan radikal. GAPI memiliki tujuan menuntut pemerintah Belanda supaya Indonesia mempunyai parlemen sendiri, sehingga GAPI memiliki semboyan Indonesia Berparlemen.¹⁰ Pada masa moderat ini pergerakan yang dilakukan organisasi lebih berjalan lancar dari pada masa pergerakan pada periode radikal.

PERGERAKAN DI DAERAH YANG BERTUJUAN NASIONAL

Setelah berdirinya Budi Utomo sebagai pelopor pergerakan kemudian disusul oleh organisasi-organisasi daerah yang mencerminkan identitas dan perkembangan sosio-kultural daerah. Lama kelamaan mereka terseret oleh arus nasionalisme yang makin kuat. Pada umumnya mereka tetap tinggal dalam organisasi sendiri.¹¹ Menurut Suhartono organisasi-organisasi itu seperti: Pasundan (1914), Moluks Politiek Verbond (1929), Persatuan Minahasa (1927), Rukun Minahasa (1912), Timors Verbond (1921), Perserikatan Madura (1920), Sarekat Madura (1925), Sarekat Sumatra (1927).¹² Unsur-unsur etnosentrisme dan regionalisme pada dasarnya selalu ada pada suatu organisasi. Regionalisme tetap ada dalam kedudukannya dengan mengisolasi dirinya agar tidak ada pengaruh dan campur tangan dari luar. Tetapi regionalisme juga dapat menyatukan diri sehingga menciptakan sebuah nasionalisme.

Peranan pemuda dalam pergerakan nasional ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan dan keagamaan, setelah periode tersebut pemuda mulai terlibat dalam masalah politik nasional. Organisasi pemuda yang pertama ikut berperan dalam perjuangan rakyat Indonesia adalah Tri

⁹ Kartodirjo, Sartono, *Sejak Indische Sampai Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm 117.

¹⁰ Rudiyanto. Natalia Kartika Dewi, *Peranan Gabungan Politik Indonesia Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1939-1941*. Makalah. Program Studi Pendidikan Sejarah. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2013, hlm 17.

¹¹ Suhartono., *Loc.Cit.* hal 97

¹² *Ibid*, hal 98.

Koro Dharmo yang kemudian berubah menjadi Jong Java (1916), Jong Sumateranen Bond (1917), Jong Celebes (1918), Jong Minahasa (1918), Sekar Roekoen (1919), Jong Batak Bond (1925), Jong Islamieten Bond (1925) dan sebagainya.¹³ Organisasi pemuda dari berbagai daerah ini memiliki satu tujuan yaitu memperluas persaudaraan, dan mengembangkan kebudayaan masing-masing daerah serta organisasi yang berasaskan kebangsaan seperti PI, PPPI dan pemuda Indonesia. Para organisasi pemuda ini melaksanakan kongres pemuda. Terlaksananya kongres pemuda I dan kongres pemuda II ini menjadi cikal bakal lahirnya Sumpah Pemuda, hal ini merupakan bukti kerja keras dari kaum pemuda Indonesia dalam ikut serta meningkatkan nilai-nilai kebangsaan, sehingga hal ini membuktikan bahwa peranan pemuda memiliki eksistensinya dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.

Pada tahun 1928 perkumpulan-perkumpulan wanita berhasil membentuk Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) yang kemudiari namanya berubah menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PIII) pada tahun 1929 melalui Kongres Perempuan Indonesia Pertama 22 Desember 1928.¹⁴ Pergerakan wanita di Indonesia secara nasional dipelopori oleh R.A. Kartini, yang mendirikan sekolah perempuan pertama. Di berbagai daerah banyak tokoh perempuan wanita lainnya yang memiliki peran dalam pergerakan nasional Indonesia, salah satunya yaitu di daerah Minangkabau. Lahirnya pergerakan perempuan di Minangkabau ini dilatar belakangi oleh adanya modernisasi pendidikan di Sumatra, sehingga melahirkan wanita-wanita terpelajar.¹⁵

Kesempatan untuk bersekolah ini yang nantinya melahirkan perempuan-perempuan terpelajar yang menjadi awal mula kelahiran pergerakan perempuan di Minangkabau. Perempuan-perempuan terpelajar ini berperan besar karena mendirikan berbagai sekolah khusus perempuan seperti Sekolah Karadjinan Amai Satia, Roehana School, Sakola Kautamaan Isteri Dewi Sartika di Bandung, Sekolah Tenun, Vrouwen Normal School, Dinnijah School Puteri, dan Sekolah Menyesal. Selain mendirikan sekolah, perempuan terpelajar Minangkabau juga mendirikan surat kabar seperti tokoh Roehana Kudus yang mendirikan surat kabar Soenting Melajou, ada juga surat kabar yang didirikan tokoh lain seperti surat kabar Asjraq dan Soera Kaum Iboe Soematera.

MASA KRISIS PERGERAKAN NASIONAL

Terjadinya krisis pergerakan nasional dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah: (1) Krisis Malaise 1929/1930 yang melanda dunia; (2) Diterapkannya peraturan pembatasan hak untuk berkumpul dan berserikat

¹³ Yulianti, Citra, dkk. "Peranan Pemuda Dalam Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1908-1928". Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Jember, hlm 4.

¹⁴ G.A. Ohorella, dkk, Peranan Wanita Indonesia Dalam Masa Pergerakan Nasional, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1992)

¹⁵ Yanti, Risa Marta, *Lahirnya Pergerakan Perempuan Minangkabau pada Awal Abad XX*, Jurnal Kafa'ah. Vol 7, No 2 (2017), hlm 10.

(dibentuknya PID); (3) Gubernur Jenderal dapat menyatakan suatu organisasi pergerakan atau kegiatan yang dilakukannya bertentangan dengan law and order termuat dalam (Koninklijk Besluit 1 September 1919); dan (4) Banyak tokoh pergerakan kebangsaan Indonesia yang diasingkan.¹⁶

Krisis Malaise atau diberbagai literatur sering disebut sebagai “zaman meleset” merupakan saat dimana terjadinya malaise atau depresi ekonomi di dunia, salah satu nya adalah Indonesia. Indonesia juga terpengaruh oleh depresi ini baik kehidupan ekonomi rakyat maupun kehidupan politik. Pada saat terjadinya Krisis Malaise Pihak pemerintah atau pemilik perusahaan mengambil keuntungannya sendiri tanpa menghiraukan peranan dan jasa buruh dalam sebuah perusahaan. Akibat malaise, persatuan rakyat terutama kaum buruh semakin kuat, menyebabkan munculnya berbagai pemberontakan dan aksi politik lainnya yang dilakukan oleh kaum buruh melalui oerorganisasi Pergerakan Nasional yang bersifat radikal.

Adapun serikat buruh atau organisasi buruh tersebut adalah Perserikatan Buruh Kereta Api atau Vereeniging van Spoor-en Tramwegpersoneel (VSTP), PGHB (Persatuan Guru Hindia Belanda), PPPB (Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputra), PFB (Personeel Fabriek Bond).¹⁷ Usaha-usaha organisasi buruh tersebut dalam melepaskan diri dari kesengsaraan ekonomi dan politik kolonial Belanda selalu mendapat hambatan-hambatan dari Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini pun menyebabkan pemerintah Hindia Belanda semakin memperketat pengawasan organisasi pergerakan bahkan menghapuskan organisasi yang bersifat radikal.

Selain krisis malaise ada faktor luar lainnya yang mempengaruhi krisis pergerakan yaitu berupa sikap keras .dari Gubemur Jenderal de Jonge. Ia dianggap sangat reaksioner dan kejam karena tidak memberi kebebasan bagi orang yang mengeluarkan pendapatnya. Salah satu tindakan Gubemur Jenderal de Jonge adalah dengan membuat PID atau Polietiekr Intelligent Dienst untuk mengawasi dan mengatasi organisasi-organisasi yang sekiranya dapat mengancam status quo pemerintah Hindia Belanda. Pembentukan PID merupakan salah satu respon dari pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi pergerakan dari berbagai organisasi yang terjadi adapun strategi PID yaitu: Pengawasan Organisasi dan Tokoh Pergerakan, Infiltrasi Agen – agen Intelijen, Penangkapan dan Pengasingan Tokoh Pergerakan, Sensor Media Cetak Pergerakan, dan Pengawasan Terhadap Penduduk Asing.

Hal ini berarti bahwa tanpa melalui proses pengadilan lebih dahulu, ataupun menyelidiki Gubernur Jendral Belanda pada saat itu yaitu De Jonge dapat menyatakan suatu organisasi pergerakan atau kegiatan yang sedang dilakukannya itu bertentangan dengan law and order sesuai dengan Koninklijk Besluit pada 1

¹⁶ Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia : dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*, (Semarang:IKIP Semarang Press, 1995), hlm 99.

¹⁷ Akob ,Bachtiar & Teuku Junaidi, *Malaise Dan Pengaruhnya Terhadap Gerakan Nasional Indonesia*, Jurnal Seuneubok Lada, No.1, Vol.2 Juli - Desember 2014, hlm 5

September 1919. Peraturan ini merupakan modifikasi dari pasal 111 R.R (Regreering Reglement).¹⁸ Otoritas yang di miliki Gubernur Jendral De Jonge ini membuat pergerakan nasional menghadapi hambatan yang besar karena tanpa proses peradilan atau penyelidikan terlebih dahulu mereka langsung bisa diadili dan diberi hukuman.

Tan Malaka dalam buku "dari penjara ke penjara" pernah mengatakan bahwa tokoh siapapun yg dianggap mengancam ketentraman imperiaslis Belanda boleh di ditangkap, dipenjara, sebelum dibuang sebelum di asingkan.¹⁹ Politik reaksioner dari Gubernur Jendral de Jonge (1931-1936) telah membuka halaman baru dalam politik kolonial pada awal 1930-an. Politik reaksioner itu membuat pergerakan nasional tidak diakui eksistensinya. De Jonge menggunakan hak-hak exorbitant melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh nasional yang dipandanginya sebagai kelompok ekstrimis. Salah seorang yang menjadi korban adalah Soekarno. Soekarno ditangkap pada 1 Agustus 1933, dan dibuang ke Flores kemudian ke Bengkulu.

PERGERAKAN NASIONAL 1940-1942

Gubernur Jendral Hindia Belanda De Jonge di gantikan oleh Gubernur Jendral baru yaitu TJarda van Starckenborgh Stachouwer yang menjabat tahun 1936-1942. Meskipun Gubernur Jendral De Jonge telah tergantikan namun bukan berarti segala aktivitas organisasi pergerakan tidak lagi mendapat pengawasan yang sangat ketat, hal ini malah terjadi sebaliknya, segala aktivitas politik organisasi pergerakan yang pada saat itu diwakili oleh Parindra, Gerindo, dan Gapi tidak bisa berbuat banyak karena pada masa ini segala macam kegiatan sangat diawasi. Aktivitas parlementar lah yang merupakan satu-satunya jalan yang bisa ditempuh demi mendekati pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu telah mendekati masa kemundurannya.

Dalam posisi intemasional kedudukan Belanda yang makin sulit membuat pemerintah kolonial Belanda di Indonesia tidak bisa berbuat banyak ditambah lagi keadaan di Indonesia yang semakin kuat mendesak untuk dilakukannya perbaikan sosial dan politik. Kekuatan politik yang bertahan pada waktu itu adalah: Parindra terdiri dari golongan menengah, tinggi dan cendekiawan, sedang Gerindo terdiri dari golongan menengah dan keeil serta bekas anggota PKI. Anggota PNI lama menyebar ke semua partai dari Parindra sampai ke PSH dan Muhammadiyah. Didalam berbagai sumber diperkirakan bahwa orang Indonesia yang ikut menentang pemerintah kolonial menjadi 200.000 orang sedangkan yang prokolonial sedikit sekali.²⁰

Gabungan Politik Indonesia atau GAPI yang didirikan pada tahun 1939 memilili tujuan untuk menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai

¹⁸ *Ibid*, hlm 7

¹⁹ Tan Malaka, *Dari Penjara Ke Penjara*, (Yogyakarta: Narasi. 2008), hlm 39.

²⁰ Suhartono., *Loc.Cit.* hal 118

parlemen sendiri, sehingga GAPI mempunyai semboyan Indonesia Berparlemen. Sedangkan untuk latar belakang lahirnya GAPI ini disebabkan oleh gagalnya petisi Sutarjo, petisi yang berisi permohonan agar diadakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Permintaan Gapi yang tidak langsung terealisasi membuat organisasi ini semakin menggebu-gebu. Kongres yang dilakukan Gapi makin kuat kedudukannya karena dihadiri berbagai lapisan masyarakat. Sikap kolektif organisasi ini dan sambutan-sambutannya menunjukkan adesi dengan Gapi. Mulai dari kelompok buruh, wanita, pemuda, persatuan Islam, mahasiswa dan wakil-wakil daerah bergabung dalam Gapi.

Pemerintah kolonial Belanda seharusnya menyadari keinginan rakyat karena dalam mempertahankan wilayah jajahannya dari serangan negri lain terutama pada saat itu terjadinya invasi Jepang ke Indonesia menjadikan. Upaya ini tidak dilakukan padahal perlu dilakukan demi mobilisasi pertahanan dalam masa genting ini demi kerja sama yang erat antara pemerintah dan rakyat yang akan dicapai melalui parlemen. Ketika pemerintah Hindia Belanda tidak sanggup lagi menghadapi kekuatan invasi Jepang dan tidak adanya dukungan dari rakyat Indonesia dalam menghadapi Jepang maka akhirnya pemerintah kolonial Belanda pun akhirnya menyerahkan diri penyerahan diri ini dilakukan di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942.²¹ Penyerahan diri kolonial Belanda kepada Jepang di Indonesia ini dikenal sebagai perjanjian Kalijati.

PERAN PERS DALAM PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA

Dalam sejarahnya perkembangan pers di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pergerakan nasional di Indonesia. Satu kesatuan ini tidak dapat dipisahkan karena pers merupakan salah satu media utama yang digunakan oleh para tokoh pergerakan untuk menyampaikan perlawanan melalui opini-opini yang dimuat berdasarkan fakta yang ada, pers juga digunakan sebagai media untuk menyampaikan kritik terhadap kolonial Belanda dan peran pers yang paling utama adalah mampu memobilisasi massa. Raden Mas Djokomono alias Raden Mas Tirta Adhi Soerjo merupakan seseorang dari elite terdidik yang sadar akan pentingnya pers yang harus dimiliki golongan pribumi. Pada tahun 1906, beliau mendirikan Sarekat Priyayi dan menerbitkan surat kabar Medan Prijaji di Bandung pada 1907. Selain itu, ia juga menerbitkan *Poetri Hindia* sebagai majalah perempuan pertama di Indonesia tahun 1908.²² Tulisan-tulisan yang diterbitkan Tirta di surat kabar banyak mengkritik dan membeberkan kesewenang-wenangan pejabat pemerintah. Sehingga ia pun dihukum dan diasingkan berkali-kali.

Semakin bertambahnya golongan elite modern yang terdidik, semakin tumbuh pula kesadaran pada mereka akan perlunya kemajuan dan kesejahteraan bagi penduduk bumiputera. Kesadaran itu kemudian diwujudkan dengan membentuk organisasi pergerakan, dengan pers sebagai sarana untuk

²¹ Yasemis, *Jepang Dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Jurnal Sejarah Lontar. Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2007, hlm 11.

²² Suwirta, Andi. "Zaman Pergerakan, Pers, dan Nasionalisme di Indonesia". Universitas Pendidikan Indonesia, hlm 6.

mengkomunikasikan gagasan, cita-cita dan program yang lain. Sehingga setiap organisasi pergerakan yang lahir dari awal abad ke-20an telah memiliki surat kabarnya masing-masing. Pada umumnya setiap organisasi pergerakan memiliki cita-cita dan tujuan yang sama sebagaimana tercermin dalam isinya yaitu tentang perlunya kemajuan, kesejahteraan, dan akhirnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, namun dalam hal bagaimana bentuk dan cara-cara perjuangan yang akan digunakan untuk mewujudkan cita-cita itu tiap-tiap organisasi memiliki pandangan yang berbeda.

KESIMPULAN

Dari pemaparan yang telah diberikan dapat disimpulkan bahwa masa pergerakan nasional dimulai ketika berdirinya organisasi nasional pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Pergerakan nasional merupakan suatu babak baru dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, karena perlawanan kebangsaan Indonesia pada awalnya bersifat non kooperatif dan bersifat kedaerahan. Corak perjuangan bangsa Indonesia terbagi kedalam tiga periode atau tiga masa yaitu dimulai pada masa pembentukan 1908-1920, kedua masa radikal 1920 – 1930, dan terakhir yaitu masa moderat 1930 – 1942. Selain pergerakan yang bersifat nasional, terdapat juga pergerakan yang bersifat regional atau kedaerahan seperti organisasi wanita dan organisasi kepemudaan yang menjadi cikal bakal lahirnya sumpah pemuda.

Dalam perjalanan organisasi pada masa pergerakan nasional terdapat masa krisis yang menjadikan pergerakan organisasi menjadi terhambat adapun krisis pergerakan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti: (1) Krisis Malaise 1929/1930 yang melanda dunia, (2) Diterapkannya pembatasan hak untuk berkumpul dan berserikat, (3) Gubernur Jenderal dapat menyatakan suatu organisasi pergerakan atau kegiatan yang dilakukannya bertentangan dengan law and order, dan (4) Banyak tokoh pergerakan kebangsaan Indonesia yang diasingkan. Perekrutan organisasi pergerakan pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda di dominasi oleh partai seperti Parindro, Gerindo dan Gapi. Permintaan Gapi untuk berparlemen tak diindahkan pemerintah kolonial Belanda bahkan hingga masa keruntuhan kolonial Belanda di Indonesia akibat invasi Jepang yaitu pada tanggal 8 Maret 1942 dengan cara kolonial Belanda menyerahkan diri kepada Jepang di Kalijati sehingga disebut dengan perjanjian Kalijati.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar

Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie. "Pest in Semarangse," 11 Mei 1951.

Jurnal

- Akob ,Bachtiar & Teuku Junaidi, *Malaise Dan Pengaruhnya Terhadap Gerakan Nasional Indonesia*, Jurnal Seuneubok Lada, No.1, Vol.2 Juli - Desember 2014.
- Atik Fajar Kurniawati, dkk, *Politieke Inlichtingen Dienst (PID) Pada Masa Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1916-1942'*, Jurnal CANDI, Vol 12, No 2 (2015).
- Husda,Husnaini, *Rekontruksi Sejarah Kebangkitan Nasional*, Jurnal Adabiya. Vol 21, No 2 (2019).
- Rudiyanto. Natalia Kartika Dewi, *Peranan Gabungan Politik Indonesia Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1939-1941*. Makalah. Program Studi Pendidikan Sejarah. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2013.
- Suwirta,Andi. "Zaman Pergerakan, Pers, dan Nasionalisme di Indonesia". Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yanti, Risa Marta, *Lahirnya Pergerakan Perempuan Minangkabau pada Awal Abad XX*, Jurnal Kafa'ah. Vol 7, No 2 (2017).
- Yasmis, *Jepang Dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Jurnal Sejarah Lontar. Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2007.
- Yulianti,Citra, dkk. "Peranan Pemuda Dalam Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1908-1928". Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Jember.

Buku

- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008*. Jakarta: Serambi, 2010.
- Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia : dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*, (Semarang:IKIP Semarang Press, 1995).
- G.A. Ohorella,dkk, *Peranan Wanita Indonesia Dalam Masa Pergerakan Nasional*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,1992).
- G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20*. (Yogyakarta: Kanisius, 1988).
- Sartono Kartodirjo, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia V*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Balai Pustaka, 1977).
- Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1942-1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988).
- Ors. Sudiyo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia: Dari Budi Utomo sampai dengan Pengakuan Kedaulatan"*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997).
- Tan Malaka, *Dari Penjara Ke Penjara*, (Yogyakarta: Narasi. 2008).

Skripsi

- Mardiyah. "Ulama dan Pergerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Banten Abad Ke-20", Skripsi Fakultas Adam Dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2017, hlm 46.